

PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMUTAKHIRAN KARTU KELUARGA DI DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Oleh :

Monika Luinski^{1*}

NIM. E1011171046

Sri Maryuni^{2*}, Dhidik Apriyanto^{2*}

Surel : monika.luinski99@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui komunikasi, keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga, dan pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yaitu seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Sarang Burung Danau yang berjumlah 1442 kepala keluarga serta sampel sebanyak 94 kepala keluarga. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan persentase, rata-rata (*mean*), standar deviasi dan analisis statistik inferensial dengan uji normalitas data, uji korelasi *product moment* dan analisis regres linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mayoritas respon masyarakat terkait komunikasi yang diterapkan di Desa Sarang Burung Danau adalah kategori sangat setuju sebanyak 45.7 persen 2) mayoritas respon masyarakat terkait variabel keberhasilan implementasi program pemutakhira kartu keluarga pada Desa Sarang Burung Danau adalah kategori sangat setuju sebanyak 70.2 persen) hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga. Persamaannya adalah $Y = 4,293 + (0,376)X$. variabel X adalah komunikasi dan variabel Y adalah keberhasilan implamentasi program pemutakhiran kartu keluarga. Setelah data diolah, dihasilkan nilai (*r*) sebesar 0,764 menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat. Kontribusi pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga sebesar 58,3 %, sisanya 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi pogram pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan taraf signifikan 0,000. Pemerintah desa sarang burung danau diharapkan dapat memasang banyak spanduk/ banner/ baliho/ pamflet informasi tentang administrasi kependudukan dan informasi lainnya baik dalam ukuran besar maupun kecil di setiap dusun atau Rt. Hal ini dapat mengurangi ketidaktahuan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi yang telah disampaikan melalui internet atau media sosial.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program.

THE EFFECT OF COMMUNICATION TOWARDS THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE FAMILY CARD UPDATING PROGRAM IN SARANG BURUNG DANAU VILLAGE, JAWAI SUB DISTRICT, SAMBAS REGION

By :

Monika Luinski^{1*}

Student Number. E1011171046

Sri Maryuni^{2*}, Dhidik Apriyanto^{2*}

Surel : monika.luinski99@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

ABSTRACT

This study aims to determine communication, successful implementation of the family card updating program, and the effect of communication on the successful implementation of the family card updating program in Sarang Burung Danau Village, Jawai Sub district, Sambas Region. The study used a quantitative approach. The population was all family heads in the Sarang Burung Danau Village (1442 families). 94 of them were taken as the research sample. The data were then analyzed using a descriptive statistical analysis. The analysis searched for percentage, average (mean), standard deviation and inferential statistical analysis with data normality test, product moment correlation test and linear regression analysis. The results showed that 1) the majority of community responses related to communication implemented in the Sarang Burung Danau Village were categorized "strongly agree" as much as 45.7 percent. 2) The majority of community responses related to the success variable of the implementation of the family card updating program in the Sarang Burung Danau Village were classified as "strongly agree" as much as 70.2 percent. The results of the analysis showed that communication had a positive and significant effect on the successful implementation of the family card updating program. The equation was $Y = 4.293 + (0.376)X$ where variable X is communication and variable Y is the success of implementing the family card updating program. The data processing resulted in a value (r) of 0.764 indicating a very strong positive relationship. The contribution of the communication effect to the successful implementation of the family card updating program was 58.3%, while the remaining 41.7% was influenced by other factors. In addition, the hypothesis testing showed that there was an effect of communication on the successful implementation of the family card updating program with a significant level of 0.000. For that reason, the government of Sarang Burung Danau village should post many banners, billboards, and information pamphlets about population administration and other information both large and small in each hamlet. This can reduce ignorance for people who cannot access information that has been submitted via the internet or social media.

Keywords: Implementation, Policy, Program.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Sambas adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk sekitar 636.615 jiwa dengan 19 kecamatan, 193 desa dan 180.589 kepala keluarga berdasarkan data kependudukan pada tahun 2019. Berdasarkan jumlah yang sangat fantastis tersebut, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk menertibkan administrasi kependudukan dengan cara memperbaiki data-data kependudukan mulai dari dasar yaitu dari proses pemutakhiran Kartu Keluarga (KK).

Program pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) adalah salah satu program turunan dari Gerakan sadar administrasi kependudukan. Gerakan sadar administrasi kependudukan atau yang lebih dikenal dengan "GISA" adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. GISA dilaksanakan dengan empat program yaitu: (1) Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, (2) Program sadar pemutakhiran data kependudukan, (3) Program sadar pemanfaatan data

kependudukan dan (4) Program sadar melayani administrasi kependudukan. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pemutakhiran/ update yang dimaksud adalah pembaharuan data-data kependudukan yang ada dalam dokumen kartu keluarga setiap kali terdapat perubahan data seperti status perkawinan, penambahan/pengurangan jumlah anggota keluarga dan pembaharuan dokumen kartu keluarga yang masih berformat lama menjadi dokumen dengan format baru seperti yang saat ini dipakai adalah dokumen kartu keluarga dengan format siak 7.0 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Versi 7.0).

Program pemutakhiran dan ketiga program GISA lainnya ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada BAB II Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 Ayat 3 yang berbunyi "Setiap penduduk wajib

melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Program yang sangat gencar dilaksanakan oleh Disdukcapil salah satunya adalah pemutakhiran kartu keluarga. Tujuan dan maksud pemutakhiran kartu keluarga ini adalah untuk mengakuratkan data kartu keluarga dan memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data yang terdapat dalam penerbitan kartu keluarga yang lama agar tidak terjadi lagi kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam penerbitan dokumen-dokumen kependudukan yang lain.

Program ini mulai digencarkan secara serentak di seluruh desa dalam setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, termasuk daerah kecamatan yang berada di pelosok wilayah Kabupaten Sambas. Daerah Kabupaten Sambas sendiri memiliki banyak daerah kecamatan yang dianggap daerah pelosok kabupaten, yang jarak tempuh daerah tersebut untuk menuju pusat kabupaten sangat jauh dan bahkan harus menyebrangi sungai. Daerah kecamatan tersebut adalah kecamatan Tekarang, Kecamatan Jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Paloh.

Keenam kecamatan tersebut merupakan daerah pelosok Kabupaten Sambas yang penduduknya paling sedikit melakukan pemutakhiran kartu keluarga. Kecamatan Jawai merupakan salah satu dari dari keenam kecamatan tersebut yang memiliki jumlah penduduk 48.077 jiwa atau 7.55% dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas, yang menempati peringkat keempat jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Sambas dengan 13 desa yang ada di dalamnya. Dengan jumlah yang demikian, kecamatan Jawai termasuk daerah kecamatan yang sangat sedikit dokumen kartu keluarga (KK) yang telah dimutakhirkan, salah satu desa yang sangat sedikit memutakhirkan kartu keluarga adalah desa Sarang Burung Danau yang berdasarkan pengolahan data agregat semester 2 tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tercatat sebanyak 750 Kartu Keluarga yang telah *terupdate*/termutakhirkan dari keseluruhan Kartu Keluarga yang ada di Desa Sarang Burung Danau.

Desa SB. Danau adalah salah satu desa pelosok yang berada di perbatasan kecamatan Jawai dan kecamatan Tangaran dengan wilayah terluas di kecamatan Jawai dan jumlah penduduk yang tergolong padat, berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sambas tahun 2020 yaitu 5420 penduduk dengan 1442 Kepala Keluarga. Jadi semenjak diberlakukannya penggunaan KK terbaru (yang telah dimutakhirkan) sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan E-KTP, Akta (kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian), Paspor dan kegiatan penting seperti pendaftaran pernikahan di KUA dan kepindahan penduduk, masyarakat banyak mengeluhkan tertundanya keperluan penting mereka dan banyaknya kesalahan data pada dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum program ini diimplementasikan. Ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan Kartu Keluarga lama karena merasa tidak ada kepentingan yang melibatkan dokumen tersebut dan karena tidak mengetahui informasi mengenai kewajiban pemutakhiran data dalam Kartu Keluarga.

2. Identifikasi Masalah

Adapun secara umum yang menjadi permasalahan dalam implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga antara lain:

- a. Masih terdapat 692 atau 47.9 % masyarakat yang tidak mengupdate (memutakhirkan) kartu keluarganya sesuai dengan program GISA yang berdasarkan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Masyarakat masih banyak yang menggunakan kartu keluarga dengan format SIAK versi 6.0 (SIAK versi lama)

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas dan kemukakan di atas, diketahui bahwa faktor kurangnya informasi masyarakat terhadap pentingnya pemutakhiran data Kartu Keluarga menjadi masalah dalam pengimplementasian Program Pemutakhiran Kartu Keluarga. Oleh sebab itu penelitian ini membatasi pada masalah komunikasi dalam penyampaian informasi yang menjadi faktor dalam berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas

4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas?”

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan komunikasi dan implementasi program pemutakhiran Kartu Keluarga di Desa Sarang Burung Danau
- b. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga di Desa Sarang Burung Danau

6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam penelitian dalam bidang Ilmu Administrasi Publik terkhusus Kebijakan Publik. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan informasi bagi pembaca sebagai referensi bagi penulis yang lain.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan/atau sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintahan Kabupaten

Sambas dalam mengoptimalkan Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ketertiban administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut R. Dye (dalam Winarno, 2016, 19) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: “*Whatever governments choose to do or not to do*”, “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Konsep ini mencakup tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi.

Friedrich (Winarno 2016, 20) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Pressman dan Wilddavsky (dalam Wahab2010, 64) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepatutnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Seperti

yang telah dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah “tindakan yang dilakukan baik oleh individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabtler yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010, 87)).

3. Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Winarno 2014, 177-205) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

yang dipengaruhinya.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal?. Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting tersebut dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (kecenderungan) dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi kebijakan mempunyai dua bentuk, yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, yang kedua informasi mengenai data kebutuhan dari para pelaksana dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III adalah:

a. Pengangkatan birokrat, pemilihan

dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga (masyarakat).

b. Insentif, pada umumnya orang

bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena

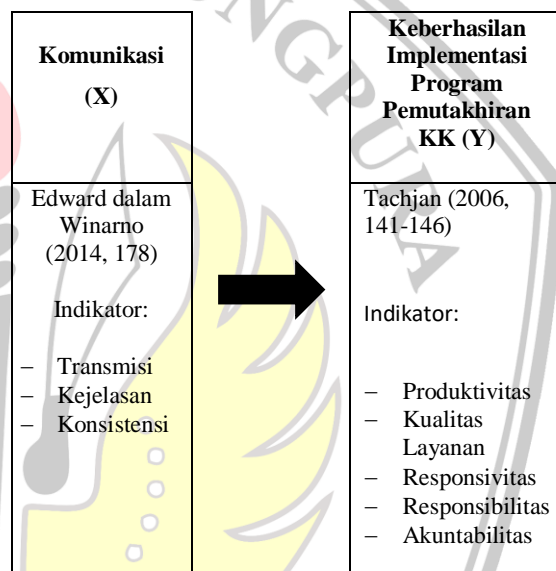
terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik dan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

4. Kerangka Pikir

Berkaca dari studi lapangan, semenjak diberlakukannya penggunaan KK terbaru (yang telah dimutakhirkan) sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan E-KTP, Akta (kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian), Paspor dan kegiatan penting seperti pendaftaran pernikahan di KUA dan perpindahan penduduk, masyarakat banyak mengeluhkan tertundanya keperluan penting mereka dan banyaknya kesalahan data pada dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum program ini diimplementasikan. Diketahui ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan Kartu Keluarga lama karena merasa tidak ada kepentingan yang melibatkan dokumen tersebut dan karena tidak mengetahui informasi mengenai kewajiban pemutakhiran data dalam Kartu Keluarga. Masalah-masalah tersebut merupakan salah satu contoh ketidakberhasilan implementasi program yang pada tataran ini adalah implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga. Ketidakberhasilan implementasi program

tersebut berdasarkan teori Edward III dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penulis mencoba mengetahui adanya pengaruh dari salah satu variabel tersebut, yaitu Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga.

Kerangka Pikir



Sumber: peneliti, 2021

5. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan teori Edward, komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi program, untuk itu penulis

menentukan hipotesis penelitian ini yang akan diuji kebenarannya sebagai berikut:

Ha: Ada pengaruh komunikasi terhadap Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga di Desa Sarang Burung Danau.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan korelasi antara suatu gejala sosial (variabel X) dengan gejala sosial lain (variabel Y).

Menurut Tohardi (2010:36-37) ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, tahapan tersebut seperti:

- a. Memilih atau menentukan permasalahan penelitian (*research problem*).
- b. Melakukan Pra Survey (pra penelitian) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi awal.
- c. Membuat rencana atau desain penelitian atau yang disebut juga dengan proposal penelitian yang memasukkan unsur rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, memilih pendekatan dan

jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- d. Melaksanakan penelitian.
- e. Membuat laporan hasil penelitian.

Untuk memperoleh data dalam rangka penelitian yang berupa data objektif maka digunakan metode penelitian yang intinya diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dan efisien dalam mendukung pembahasan yang akan dilakukan. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi, kuesioner dan dokumentasi.

Selanjutnya yaitu terkait keabsahan data peneliti menggunakan teknik Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Validitas menurut Sugiyono (2017, 125) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau di atas 0.3 maka item tersebut dinyatakan *valid*, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0.3 maka item tersebut dinyatakan tidak *valid*.

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang digunakan dalam hal ini dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh

responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Maksud dari uji reliabilitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, dan konsistensi meskipun kuesioner ini digunakan dua kali atau lebih pada lain waktu. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan dalam kuesioner yang telah dinyatakan valid.

Nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien *alpha cronbach* berdasarkan kriteria batas terendah reliabilitas adalah 0.6. Bila kriteria pengujian terpenuhi maka kuesioner dinyatakan *reliable*.

D. Pembahasan

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang diterapkan di desa Sarang Burung Danau menunjukkan nilai rata-rata hasil penelitian sebesar 4,33 yang berada dalam kategori sangat setuju sebesar 45.7 persen, hal tersebut ditinjau dari indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- a. Transmisi, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator transmisi atau penyampaian memiliki nilai rata-rata 4,29. Dapat diketahui bahwa tingkat penyampaian informasi mengenai program pemutakhiran kartu keluarga

(transmisi) dari pemerintah setempat kepada masyarakat Desa Sarang Burung Danau menunjukkan kecenderungan yang baik. Dari hasil observasi lapangan juga membuktikan bahwa transmisi informasi mengenai program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau kurang baik hal ini dapat dilihat dari peran pihak pemerintahan desa yang kurang masif menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui ketua Rt masing-masing daerah tempat masyarakat Desa Sarang Burung Danau berada.

- b. Kejelasan, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator kejelasan berada memiliki nilai rata-rata sebesar 4.34. Dapat diketahui bahwa tingkat kejelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa setempat maupun dari pihak dinas terkait (Disdukcapil) menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Dari hasil observasi memang terlihat bahwa tingkat kejelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintahan setempat sangat jelas hal ini dapat dilihat dari penyampain informasi yang langsung di sampaikan oleh

perangkat desa (Ketua Rt) kepada masyarakat secara langsung datang ketiap-tiap rumah masyarakat, pemasangan pamflet dan juga baliho guna mendukung kejelasan informasi dan penyebaran informasi melalui media sosial resmi milik desa maupun dinas (disdukcapil), serta media sosial milik perangkat desa sehingga dapat dilihat dan direpost (disebarkan kembali dari masyarakat ke masyarakat) sehingga dapat berbagi informasi yang jelas.

- c. Konsistensi, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator konsistensi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,36. Dapat diketahui tingkat konsistensi informasi mengenai program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau dikatakan baik (tinggi). Dapat dilihat dari hasil observasi lapangan bahwa informasi mengenai program pemutakhiran kartu keluarga tidak berubah-ubah, meskipun terjadi perubahan pihak desa setempat akan langsung memberitahukan perubahan tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui media

sosial yang dapat direpost atau disebarakan kembali oleh masyarakat kepada masyarakat sehingga tidak ada kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat.

2. Keberhasilan Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga berada pada nilai rata-rata penelitian adalah 4,48, hal tersebut ditinjau dari indikator keberhasilan implementasi program yaitu: produktivitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan dan akuntabilitas.

- a. Produktivitas, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator produktivitas ber nilai rata-rata adalah 4,46. Hal ini berarti produktivitas pelayanan di Kantor Desa Sarang Burung Danau menunjukkan kecenderungan yang sangat baik . Dapat dilihat dari hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa produktivitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Kantor Desa Sarang Burung Danau sangat baik hal ini dapat dilihat dari pengurusan berkas pengajuan

kartu keluarga dari desa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) yang cepat dan dapat selesai tepat pada waktunya.

- b. Responsivitas, berdasarkan data hasil penelitian pada indikator responsivitas berada pada nilai rata-rata 4,45. Hal ini berarti tingkat responsivitas yang diberikan oleh petugas pelayanan di kantor desa maupun di Kantor Dinas Capil kepada masyarakat menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Dapat dilihat melalui hasil observasi lapangan bahwa setiap petugas pelayanan selalu siap dalam melayani setiap masyarakat yang datang, cepat dalam merespon masyarakat dan mampu memberikan serta menjelaskan informasi yang ada sehingga mudah untuk dimengerti oleh masyarakat.
- c. Responsibilitas, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator responsibilitas berada pada nilai rata-rata adalah 4,55. Ini berarti tingkat responsibilitas masyarakat Desa Sarang Burung Danau menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Dapat dilihat melalui hasil observasi lapangan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

mendukung keberhasilan program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau.

- d. Kualitas Layanan, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator kualitas layanan berada pada nilai rata-rata adalah 4,46. Ini berarti tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh pihak desa maupun dari pihak dinas terkait kepada masyarakat Desa Sarang Burung Danau cenderung sangat baik. Dapat dilihat dari hasil observasi lapangan bahwa masyarakat merasa nyaman dan puas dengan kualitas layanan yang diberikan, selain itu masyarakat juga merasa senang dengan keadaan lingkungan tempat pelayanan yang bersih dan nyaman serta petugas pelayanan yang selalu tampak bersih dan rapi setiap kali memberikan pelayanan sehingga menambah kenyamanan dan kualitas layanan menjadi lebih baik.
- e. Akuntabilitas, berdasarkan hasil data penelitian pada indikator akuntabilitas berada pada nilai rata-rata adalah 4,46. Ini berarti tingkat akuntabilitas cenderung sangat baik. Dapat dilihat dari observasi lapangan bahwa adanya kerjasama

yang baik antara pihak pemerintahan desa dan pihak dinas dalam mengevaluasi hasil dari program pemutakhiran kartu keluarga di desa sarang burung danau sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat manfaat dari program tersebut. Program pemutakhiran kartu keluarga juga dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan daerah sehingga dapat terimplementasi dengan baik.

3. Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Pemutakhiran Kartu Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan “diduga ada pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas”, dapat teruji kebenarannya.

Berdasarkan penelitian terdapat pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program

pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan tingkat hubungan yang cukup tinggi yaitu sebesar 58,3 persen (58,3%). Hal ini berarti masih ada faktor lain yang berpengaruh sebesar 41,7 persen (41,7%) terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau dengan $r = 0,764$ dan berdasarkan interpretasi r yang berada pada interval $0,60 - 0,799$ menunjukkan pengaruh yang kuat.

Hal ini dibuktikan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Edward III. Teori ini menyatakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Berdasarkan pendapat Edwards tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi pada masyarakat Desa Sarang Burung Danau menunjukkan mayoritas jawaban berada pada kategori sangat setuju dengan nilai rata-rata data penelitian untuk variabel komunikasi yaitu sebesar 4,33 yang berarti sangat baik. Hal ini ditinjau dari aspek transmisi (penyampaian informasi) yang berada pada kategori sangat baik dengan nilai rata-rata hasil penelitian adalah 4,29, kejelasan dengan kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 4,34 dan konsistensi dengan kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 4,36.
2. Keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga menunjukkan mayoritas jawaban berada pada kategori sangat setuju (Tabel 5.29) dengan nilai rata-rata data penelitian untuk variabel keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga yaitu sebesar 4,48 yang berarti sangat baik. Dilihat dari segi produktivitas yang berada pada kondisi sangat baik dengan nilai rata-rata adalah 4,46, responsivitas pada kondisi sangat baik dengan nilai rata-rata 4,45, responsibilitas pada kondisi sangat baik dengan nilai rata-rata 4,55, kualitas layanan berada pada kondisi

sangat baik dengan nilai rata-rata adalah 4,46 dan akuntabilitas pada kondisi sangat baik dengan nilai rata-rata adalah 4,46.

3. Komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada tingkat hubungan yang cukup tinggi. Besarnya angka R Square (r^2) adalah 0,583, artinya pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga adalah sebesar 58,3 persen (58,3%). Hal ini berarti masih ada faktor lain yang berpengaruh sebesar 41,7 persen (41,7%) terhadap keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau dengan $r = 0,764$ dan berdasarkan interpretasi r yang berada pada interval $0,60 - 0,799$ menunjukkan pengaruh yang kuat. (dapat dilihat pada Tabel 5.32 *Model Summary*). Artinya semakin baik komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah desa maupun pihak dinas terkait (disdukcapil) semakin tinggi tingkat keberhasilan implementasi program pemutakhiran kartu keluarga di Desa Sarang Burung Danau.

F. Referensi

Buku:

- Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian, Cet. V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budhiarto, Widodo. 2010. *Robotika-Teori Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Islamy. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kiswanto, Dedy. 2012. *Statistik Untuk Pemuda & Orang Awam*. Jakarta: Laskar Aksara..
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Tohardi, Ahmad. 2010. *Metode Penelitian Sosial Diklat Kuliah*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan*

Publik. Malang: Bayu Media Publishing.

- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Persindo.
- . 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. BUKU SERU.
- . 2016. *Kabijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Dokumen Resmi :

- Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJTentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminsitirasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Situs Internet:

- Qonitakhumairah. 2010. "Model-Model Implementasi kebijakan publik". 5 April. Diakses dari situs http://www.academia.edu/28653761/model_model_implementation_kebijakan_publik. Pada 20 Maret 2021

